



PEDOMAN

KEBIJAKAN PENGORGANISASIAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN :

Pengelolaan Perpustakaan Digital

**UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
2022**



**PEDOMAN KEBIJAKAN PENGORGANISASIAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN:
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL**



**UPT PERPUSTAKAAN
UIN MATARAM 2022**

SUSUNAN REDAKSI

Tim Penyusun:

Ketua:

Rika Kurniawaty, M.Hum.

Anggota:

Nuraeni, S.IPI.

Yunita Lestari, S.Adm.

Rifky Rosi Mulyadi, S.IP.

Ateja Yudi Septian, S.IP.

Syahrul Gunawan Adita, SE.

All right reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku baik

Dengan media cetak ataupun digital tanpa izin dari penulis




Diterbitkan oleh:

UPT Perpustakaan UIN Mataran

Jalan. Gajah Mada 100 Jempong Mataram NTB

LEMBAR OTORISASI
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGORGANISASIAN KOLEKSI
PERPUSTAKAAN: PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL



Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
Rektor	Wakil Rektor I	Kepala UPT Perpustakaan
		
Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag	Prof. Dr. H. Adi Fadli, M.Ag	Rika Kurniawaty, M.Hum.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pedoman kebijakan pengorganisasian koleksi perpustakaan: pengelolaan perpustakaan digital untuk UPT Perpustakaan UIN Mataram dibuat dan disusun guna memberikan garis-garis besar pelaksanaan mekanisme kerja dan unggah mandiri bagi civitas akademika UIN Mataram, serta teknis pengelolaan perpustakaan digital oleh pustakawan dan staf perpustakaan di Perpustakaan. Pedoman ini sekaligus dijadikan sebagai buku petunjuk bagi para pustakawan dan staf perpustakaan dalam menyelenggarakan tugas dan pekerjaan di bidang pengelolaan perpustakaan digital.

Namun demikian, kami menyadari bahwa pedoman ini masih perlu disempurnakan, mengingat satu masa dengan masa berikutnya akan mengalami perubahan dan perkembangan. Sekiranya pedoman ini masih kurang relevan dengan perkembangan kebutuhannya, maka layak kritik dan masukan serta akan dilakukan revisi guna menyempurnakannya. Adapun untuk lebih dipahami secara merata dan segera dalam penerapannya, sosialisasi dan berbagai upaya pemahaman kepada pihak terkait wajib dilakukan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Mataram, Oktober 2022
Kepala UPT Perpustakaan



Rika Kurniawaty, M.Hum.

DAFTAR ISI

UIN MATARAM 2022	ii
LEMBAR OTORISASI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1. LATAR BELAKANG	1
1. 2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. TUJUAN PEDOMAN.....	3
BAB II KEBIJAKAN TEKNIS PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL	5
2.1. Tujuan Kebijakan Pengelolaan Perpustakaan Digital	5
2.2. Kebijakan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Digital	5
BAB III PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN REVISI	9
3.1. PENGAMBILAN KEPUTUSAN.....	9
3.2. REVISI	9

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Pembahasan panjang mengenai pembangunan Perpustakaan digital dimulai pada tanggal 3 – 4 September 2016, difasilitasi oleh Pokja IsDB UIN Mataram, panitia mengadakan Workshop “Optimalisasi Institutional *Repository* IAIN Mataram 2016”. Saat itu pemateri yang merupakan pustakawan UIN Sunan Kalijaga, bu Sri Astuti, M.IP. menegaskan bahwa unit yang selayaknya bertanggung jawab untuk manajemen data dan membangun kebijakan adalah perpustakaan. Sementara untuk pembangunan dan *maintenance* sistem otomasinya dilakukan oleh PTIPD yang mempunyai staf berbasis IT.

Workshop yang serupa selanjutnya dilakukan setahun setelahnya, hari Kamis tanggal 9 November 2017, dengan menghadirkan Kepala Perpustakaan UIN Malang, Faizuddin Harliansyah, MIM. di perpustakaan UIN Mataram. Di dalam workshop tersebut pemateri banyak menjelaskan tentang sistem yang diakomodir oleh sebuah *repository* institusi, serta kebijakan-kebijakan yang bermain di sistem tersebut.

Dari kedua workshop tersebut, perpustakaan telah melakukan beberapa kegiatan *follow up*, namun usaha-usaha tersebut menemui jalan buntu karena beberapa hal. Kondisi yang berkembang saat itu adalah:

1. Keberadaan server untuk mengakomodir sistem untuk perpustakaan digital yang belum ada.
2. *Software e-prints* yang akan digunakan sebagai *platform* pada perpustakaan digital memang dapat di-*download* free langsung dari internet, namun untuk mengakomodir kebutuhan civitas akademika yang akan menggunakannya, software tersebut harus di-custom.

Proses *customisasi e-prints* ternyata tidak dapat diakomodir oleh kemampuan staf IT yang ada di PTIPD.

3. Begitu juga dengan *software* yang akan digunakan untuk mengklasifikasi data karya ilmiah civitas akademika UIN Mataram. Dalam hal ini perpustakaan akan menggunakan sistem klasifikasi *Australian and New Zealand Standard Research Classification (ANZSRC)*. Sistem tersebut dapat di-*download* secara *free* dari *website*-nya, namun untuk dapat memetakan karya ilmiah civitas akademika UIN Mataram, sistem tersebut harus di-*script* kembali sebagai pengembangan dari pohon utama klasifikasinya. Pengembangan yang dilakukan di sistem klasifikasi tersebut harus mengakomodir keijakan pengembangan UIN serta melibatkan analisa kurikulum di tingkat Jurusan dan Fakultas.
4. Pembangunan sistem perpustakaan digital akan mengakomodir *Institutional Repository* dan *etheses* UIN Mataram, hendaknya juga diiringi oleh pembangunan kebijakan dan prosedur kegiatan. Hal ini mutlak dibutuhkan untuk menjaga dinamisasi alur kerja dan manajemen data saat sistem telah *running*.

Proses pembangunan perpustakaan digital UIN Mataram di atas memang belum dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan, sehingga terkesan lambat. Karena itu pada tahun 2022, perpustakaan UIN Mataram memprioritaskan pembangunan system perpustakaan digital pada program kerjanya. Prioritas tersebut dipandang *urgent* karena perpustakaan digital dimaksudkan sebagai wadah untuk menampung karya ilmiah civitas akademika UIN Mataram. Wadah (tempat) tersebut diperlukan untuk :

1. Proses *upload* dan *manage* karya ilmiah dosen untuk mengakomodir kebutuhan dosen yang akan naik pangkat dan jabatan.
2. Proses *upload* dan *manage* file Tugas Akhir mahasiswa UIN Mataram.

1. 2. LANDASAN HUKUM

Landasan dalam menyusun Pedoman Pengelolaan perpustakaan digital UPT Perpustakaan UIN Mataram adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
4. Peraturan Presiden RI No. 34 Tahun 2017 Tentang Alih Status IAIN Mataram menjadi UIN Mataram.
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Mataram;
6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Perpustakaan Perguruan Tinggi
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 026084/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor UIN Mataram masa jabatan tahun 2021 s.d 2025.

1.3. TUJUAN PEDOMAN

Pedoman ini dibuat dengan tujuan:

1. Memberikan dan menyediakan pedoman pengelolaan perpustakaan digital di lingkungan UPT Perpustakaan UIN Mataram, secara sistematis, benar, tepat dan efektif;

2. Menyiapkan pedoman terstandar dalam pengelolaan perpustakaan digital bagi pustakawan dan staf perpustakaan;
3. Memberikan dukungan manajemen dan fasilitas dalam pencapaian visi, misi, dan fungsi perpustakaan sebagai lembaga pengelola dan diseminasi informasi bagi civitas akademika;

BAB II

KEBIJAKAN TEKNIS PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

2.1. Tujuan Kebijakan Pengelolaan Perpustakaan Digital

Kebijakan pengelolaan perpustakaan digital merupakan serangkaian keputusan atau ketentuan teknis yang ditetapkan untuk pengelolaan perpustakaan digital di lingkungan UPT Perpustakaan UIN Mataram. Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Pustakawan dan teknisi (staf) Perpustakaan. Tujuan kebijakan pengelolaan perpustakaan digital adalah untuk menyediakan system pengelolaan perpustakaan digital dan fasilitasnya sehingga perpustakaan dapat melayani kebutuhan informasi sivitas akademika UIN Mataram dengan baik.

2.2. Kebijakan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Digital

Kebijakan pengelolaan perpustakaan digital ini disusun atas dasar pengembangan bahan-bahan (material) digital sebagai sumber informasi di perpustakaan UIN Mataram. Hal lain yang turut mempengaruhi keberadaan dari kebijakan perpustakaan digital ini adalah kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola bahan pustaka printed. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mengakomodir aturan Dirjen DIKTI tentang kebijakan unggah karya ilmiah dan penelitian, yang mengharuskan dosen untuk mengunggah karya ilmiah nya agar dapat diakses secara online melalui berbagai *search engine* akademik dan sarana pengindeksan. Hal tersebut kemudian melatarbelakangi pengelolaan materi-materi koleksi digital menjadi suatu yang wajib dan harus ada di perpustakaan.

Koleksi-koleksi digital pada Perpustakaan UIN Mataram terdapat pada :

1. Otomasi Perpustakaan UN Mataram, di *Senayan Library Management Systems* (SliMs). Koleksi ini berasal dari ebook sumbangan para dosen dan stakeholder.

2. Koleksi buku digital pada perpustakaan digital kubuku. ebook yang bersifat perpetual ini dapat diakses pada <https://kubuku.id/download/digilib-uinma/> pada *Personal Computer* (PC), atau dengan men-*download* aplikasi “Digilib UINMA” di Appstore pada *Hand Phone*. Setelah user melakukan proses registrasi dan divalidasi oleh admin, user dapat mengakses dan melakukan transaksi sirkulasi (pinjam-kembali) koleksi secara digital melalui sistem.
 3. Repository dan eteses UIN Mataram. Koleksi yang ada pada dua database ini adalah koleksi hasil karya ilmiah dari civitas akademika UIN Mataram (*local content*). Karya ilmiah tersebut berupa artikel jurnal, buku, book section, paten, manual, bahan ajar (modul) dosen dan Tugas Akhir (skripsi, thesis, dan disertasi) mahasiswa UIN Mataram. Pengelolaan Perpustakaan digital UIN Mataram menggunakan 2 jenis *platform software*, yaitu :
 - a) *Software open source* EPrints (eprints.org) yang dikembangkan oleh *University of Southampton* UK di dalam pengelolaan perpustakaan digital, dan
 - b) Australian and New Zealand Standard Research Classification (ANZSRC) sebagai bagan klasifikasinya. ANZSRC adalah standar klasifikasi untuk mengukur, memetakan, dan menganalisa perkembangan kegiatan *research and development* yang dikembangkan di Australia dan New Zealand. Sistem klasifikasi yang dimiliki oleh ANZSRC telah mengakomodir *pure basic research, strategic basic research, applied research, dan experimental development*. Dengan 22 bidang penelitian (division) memudahkan pustakawan (staf perpustakaan) untuk melakukan *mapping field of research* karya ilmiah civitas akademika UIN Mataram.
- Karya ilmiah dosen dikelola di dalam repository (repository.uinmataram.ac.id), sementara Tugas Akhir mahasiswa

dikelola di etheses (etheses.uinmataram.ac.id). Pemisahan antara karya ilmiah dosen dan tugas akhir mahasiswa sengaja dilakukan dengan maksud sebagai berikut:

- a) *repository* dapat dijadikan sarana untuk *showcase* (menunjukkan hasil riset unggulan), meningkatkan *prestige* (nama harum lembaga), dan meningkatkan *visibility* lembaga (institusi). Riset-riset unggulan dapat disebarluaskan dengan mudah dan cepat melalui *repository*, sehingga akan meningkatkan *prestige* perguruan tinggi yang bersangkutan. Tingginya *prestige* akan menarik minat banyak calon mahasiswa, dan kekhususan serta keunggulan riset akan menarik peneliti dari luar institusi untuk melakukan *collaborative research*.
- b) *Repository* juga dapat menginformasikan kepada "dunia" tentang *expertise* (kepakaran) seorang dosen. Di *repository*, masing-masing dosen dapat mempunyai akun untuk menyimpan karya ilmiah. Pengunjung *repository* dapat memperoleh informasi tentang kepakaran dan *research interest* dosen yang bersangkutan.
- c) Peningkatan *visibility* suatu penelitian atau karya ilmiah, karena masyarakat dunia dapat dengan mudah mengaksesnya baik secara langsung maupun melalui *academic search engine* seperti *Google Scholar*, *BASE*, *CORE*, dan lain-lain. Beberapa riset mengungkapkan potensi *repository* yang cukup besar untuk meningkatkan *global visibility*.
- d) Dalam *webometrics*, tingkat *visibility* mempunyai porsi penilaian terbesar dibanding aspek lainnya. Aspek ini adalah *impact factor* dihitung dari jumlah orang yang mengutip penelitian (karya ilmiah) yang ada pada suatu *repository*. Sehingga *repository* juga berpotensi besar dalam menyumbangkan point pada *webometrics* suatu perguruan tinggi.

Berbeda dengan repository, etheses yang juga sama-sama menggunakan platform eprints dan ANZSRC ditujukan sebagai wadah untuk menampung semua Tugas Akhir (skripsi, tesis, dan disertasi) mahasiswa UIN Mataram. Pemisahan ini dilakukan untuk mempermudah pengamatan *mapping* subjek dan kejenuhan subjek penelitian di kalangan mahasiswa UIN Mataram. Etheses berfungsi untuk menunjukkan penyebaran subjek pembahasan pada tugas akhir. Hal tersebut juga dapat mengindikasikan tingkat kejenuhan pemilihan suatu subjek tertentu pada tugas akhir mahasiswa di suatu program studi.

Untuk proses akuisisi materi digital, Perpustakaan UIN Mataram menerapkan system unggah mandiri. Penerapan kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi jumlah pustakawan dan staf perpustakaan yang tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa dan dosen yang akan dilayani. Adapun mekanisme unggah mandiri dapat dilihat pada lampiran manual repository dan etheses Perpustakaan UIN Mataram.

BAB III

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN REVISI

3.1. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Apabila dikemudian hari terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pengembangan koleksi yang belum diatur dalam pedoman ini, maka kepala perpustakaan berkonsultasi dengan pimpinan akan mencari jalan keluar dan mengambil langkah cepat untuk memberikan keputusan yang menyangkut masalah kebijakan teknis pengembangan koleksi perpustakaan. Demikian halnya jika ada masukan, kritikan terkait penyusunan buku pedoman ini, maka masukan dan kritikan akan dipertimbangan untuk dijadikan acuan perubahan (revisi) di tahun berikutnya.

3.2. REVISI

Untuk keperluan penyempurnaan, pedoman ini akan ditinjau tiga tahun sekali. Jika sebelum masa tiga tahun terdapat perubahan dalam hal kebijakan pengembangan koleksi, maka pedoman ini dapat direvisi lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.